

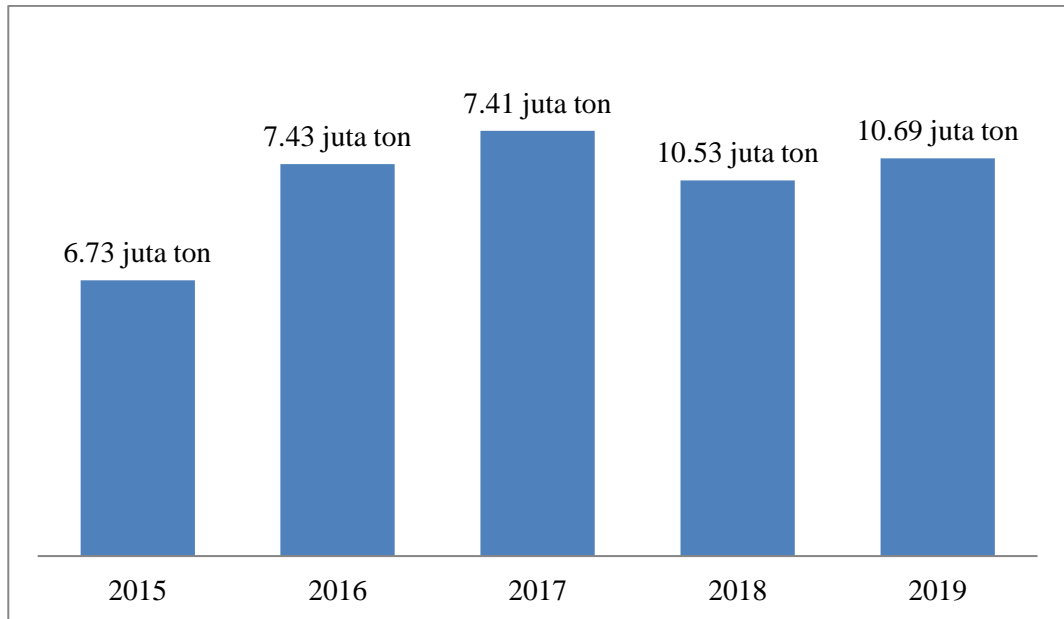
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pangan menjadi kebutuhan dasar manusia dimana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara atas kebutuhan akan pangan tersebut, termasuk negara Indonesia. Pemenuhan kebutuhan akan pangan harus mencapai ketahanan pangan, yang berarti kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Penganekaragaman pangan ini belum dapat diwujudkan di Indonesia, terbukti dengan tingginya tingkat partisipasi konsumsi beras di berbagai wilayah yang rata-rata hampir mencapai 100% (Data Susenas 2014) tanpa adanya dukungan yang seimbang pada tingkat partisipasi konsumsi bahan pangan pelengkap lainnya. Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan dari pemerintah bergerak hanya dengan menyediakan bahan pangan gandum 100% impor dengan volume yang terus meningkat dari tahun ke tahun seperti pada Gambar 1.1.



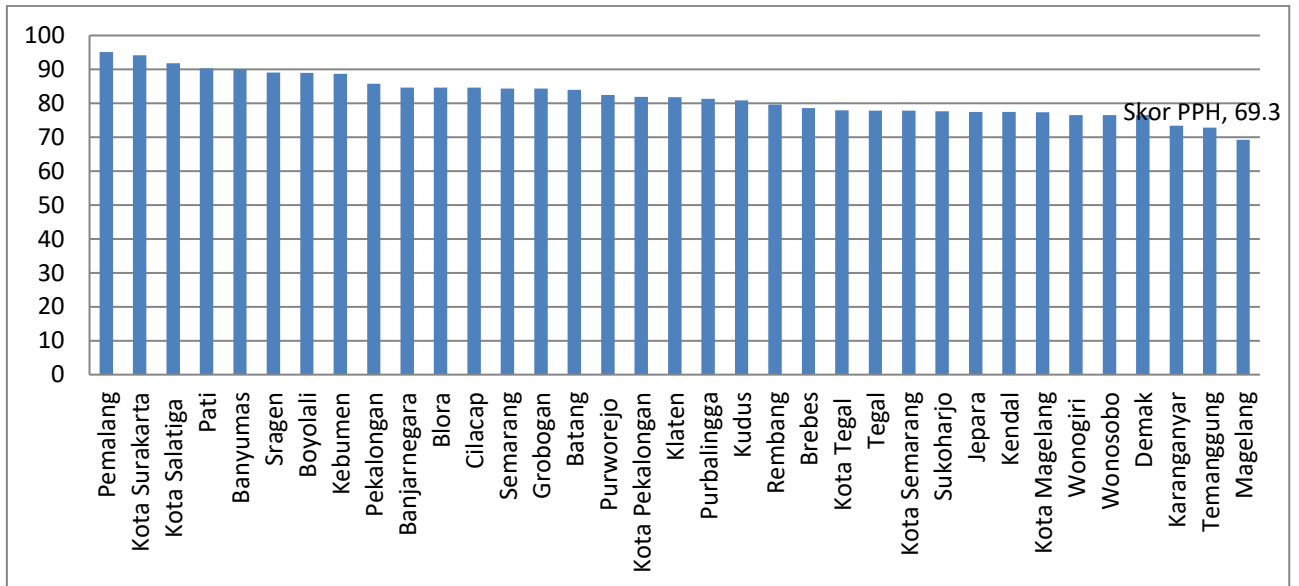
Sumber: BPS

Gambar 1.1
Volume Impor Biji Gandum dan Meslin Tahun 2015-2019

Pada Gambar 1.1 diperlihatkan volume impor biji gandum dan meslin yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2013-2014, kemudian sempat mengalami penurunan di tahun 2015 dan dilanjutkan dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 yang mencapai 11,43 juta ton. Hal tersebut menimbulkan pola konsumsi gandum dan olahannya terus meningkat disamping konsumsi beras. Bahan pangan lokal selain beras belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung konsumsi pangan yang lebih beragam dimana sebenarnya menurut Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2016, negara Indonesia memiliki kurang lebih 945 jenis sumber bahan pangan meliputi : 1) 77 jenis sumber karbohidrat ; 2) 75 jenis sumber minyak/lemak; 3) 26 jenis kacang-kacangan; 4) 389 jenis buah-buahan; 5) 228 jenis sayur-sayuran; 4) 40 jenis bahan minuman; 5) 110 jenis rempah-rempah.

Upaya pemerintah terkait penganekaragaman (diversifikasi) konsumsi pangan ini sudah muncul sejak awal dasawarsa 60-an sampai saat ini dengan adanya program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dari Badan Ketahanan Pangan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Program P2KP memiliki tujuan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dinyatakan dalam skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikasi untuk melihat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Indikasi keberhasilan dari program ini adalah tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu 100 atau 95 sebagai skor PPH yang menjadi target sasaran pemerintah pada tahun 2015 dan 92, 5 pada tahun 2019. Skor PPH konsumsi pangan penduduk di Provinsi Jawa Tengah dari 35 kabupaten/kota pada tahun 2017, seperti pada Gambar 1.2.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng

Gambar 1.2
Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa diantara 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang di tahun 2017 memiliki skor PPH terendah yaitu 69,3. Tabel 1.1 menunjukkan rincian skor PPH dari Kabupaten Magelang Tahun 2017.

Tabel 1.1
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kap/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	215,2	879,2	53,5	40,9	0,5	26,7	20,4	25,0	20,4
2	Umbi-umbian	59,4	69,1	4,2	3,2	0,5	2,1	1,6	2,5	1,6
3	Pangan Hewani	52,3	122,5	7,5	5,7	2,0	14,9	11,4	24,0	11,4
4	Minyak dan Lemak	23,6	213,2	13,0	9,9	0,5	6,5	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	7,9	43,1	2,6	2,0	0,5	1,3	1,0	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	45,9	113,7	6,9	5,3	2,0	13,8	10,6	10,0	10,0

7	Gula	30,0	110,4	6,7	5,1	0,5	3,4	2,6	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	156,5	74,8	4,6	3,5	5,0	22,8	17,4	30,0	17,4
9	Lain-lain	37,0	17,9	1,1	0,8	-	-	-	-	-
	Total		1.644,0	100,0	76,5		91,5	70,0	100,0	69,3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi 2.150 Kkal/Kapita/Hari

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa skor PPH Kabupaten Magelang pada tahun 2017 adalah 69,3 yang masih jauh dari target sasaran pemerintah yaitu 92,5 yang harus dicapai di tahun 2019. Konsumsi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah masih belum mencapai skor maksimal. Total energi aktual 1.644 kkal/kap/hari juga masih jauh dari angka kecukupan energi yaitu 2.150 kkal/kap/hari menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X (WNPG X) Tahun 2012.

Tabel 1.2
Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Perhari di
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2017

Konsumsi	Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
Energi (kkal)	2015	1.846,88	1.777,06	1.796,73
	2016	1.855,83	1.770,57	1.795,40
	2017	1.826,62	1.812,06	1.816,56
Protein (kkal)	2015	50,26	45,32	46,72
	2016	51,20	46,49	47,86
	2017	51,95	47,55	48,91

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

Rata-rata konsumsi energi dan protein di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2015-2017. Peningkatan tersebut belum mampu mencapai standar rata-rata kecukupan energi dan protein menurut WNPG X tahun 2012 yang menganjurkan konsumsi energi sebesar 2.150 kkal dan konsumsi protein sebesar 57 gram.

Skor PPH Kabupaten Magelang yang belum mencapai standar menimbulkan pertanyaan mengenai keberjalanan dari program P2KP terutama di Kabupaten Magelang.

Tabel 1.3
Perbedaan Program P2KP berdasarkan Permentan No 43 Tahun 2009
dengan Program P2KP di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Program P2KP berdasarkan Permentan No 43 Tahun 2009	Program P2KP di Kabupaten Magelang Tahun 2017
1	<p>Anggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - APBN untuk Kegiatan KRPL Rp 15.000.000/KWT - APBN untuk Kegiatan MP3L Rp 250.000.000-Rp 300.000.000 - APBD untuk Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP sesuai kebijakan masing-masing kabupaten/kota 	<p>Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - APBN untuk Kegiatan KRPL bagi 5 KWT masing-masing memperoleh Rp 15.000.0000 - APBD II untuk Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis Rp 84.250.000 - APBD II untuk Kegiatan Fasilitasi Lomba/Festival/Pameran Pangan Rp 100.000.000
2	<p>Pelaksana:</p> <p>Bupati, Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan daerah, instansi dan dinas terkait (Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan), BPP Kecamatan, Penyuluh pertanian, camat, kepala desa, KWT, UKM, perguruan tinggi, LSM, PKK, pendamping kab/kota, pendamping desa, pihak swasta</p>	<p>Pelaksana :</p> <p>Bupati, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, swasta, BPP Kecamatan, Penyuluh pertanian, camat, kepala desa, KWT, PKK, masyarakat, pendamping kab/kota, pendamping desa</p>
3	<p>Regulasi :</p> <p>Petunjuk/Pedoman Teknis, surat edaran atau Peraturan Gubernur (Pergub), surat edaran atau Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota)</p>	<p>Regulasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk/Pedoman Teknis - Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2014-2019
4	<p>Kegiatan-kegiatan terkait program P2KP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), - MP3L (Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal), - Sosialisasi dan Promosi P2KP 	<p>Kegiatan-kegiatan terkait program P2KP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), - Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis, - Fasilitasi Lomba/Festival/Pameran Pangan
5	<p>Kegiatan-kegiatan terkait program P2KP diupayakan untuk menunjang konsumsi pangan yang beragam pada masyarakat terutama kelompok penerima dana bantuan yang kemudian akan menunjang perolehan</p>	<p>KWT dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait P2KP tidak termasuk dalam daftar responden pada survey Pola Pangan Harapan</p>

	skor PPH	
--	----------	--

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, memberikan informasi bahwa program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang memiliki beberapa hal terkait aspek masukan (*input*) dan proses (*process*) pelaksanaan program yang belum sesuai dengan ketentuan sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji aspek keluaran (*output*) dan akibat (*outcomes*) dari pelaksanaan program tersebut dengan judul **“EVALUASI OUTPUT DAN OUTCOMES PROGRAM PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) DI KABUPATEN MAGELANG”**.

Identifikasi Masalah

- 1) Belum tercapainya skor PPH Kabupaten Magelang sesuai dengan standar provinsi dan nasional.
- 2) Belum optimalnya konsumsi pangan di Kab. Magelang.
- 3) Belum adanya kesesuaian antara pelaksanaan program P2KP di Kabupaten Magelang dengan ketentuan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan evaluasi *output* dan *outcomes* Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang penelitian akan diarahkan pada pembahasan mengenai:

- 1) Bagaimana capaian *output* dari Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang?

- 2) Bagaimana capaian *outcomes* dari Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang?
- 3) Apa kendala yang dihadapi terkait Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang evaluasi *output* dan *outcomes* program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang ini dilakukan dengan tujuan :

- 1) Mengevaluasi *output* Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang.
- 2) Mengevaluasi *outcomes* Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang.
- 3) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi pada Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya :

- 1) Manfaat bagi peneliti
Berguna untuk menambah wawasan mengenai teori serta praktik administrasi publik dan menambah kemampuan mengevaluasi suatu kebijakan publik.
- 2) Manfaat teoritis

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian mengenai penganekaragaman (diversifikasi) konsumsi pangan berikutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi para akademisi.

3) Manfaat praktis

Menjadi bahan masukan bagi pihak yang terkait dalam penyusunan kebijakan mengenai penganekaragaman konsumsi pangan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitiannya, terlebih dahulu peneliti melihat tren penelitian mengenai evaluasi kebijakan publik yang sudah dilakukan sebelumnya. Tren penelitian diperlukan untuk melihat perkembangan penelitian terhadap pokok permasalahan yang sama untuk melihat perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut, yang kemudian diharapkan akan menghasilkan pembaruan pada penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu juga dilakukan untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini. Peneliti menelaah beberapa penelitian nasional dan internasional yang membahas evaluasi kebijakan terutama evaluasi *output* dan *outcome*.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Golda Oktavia, Hartuti Purnaweni, Aloysius Renggapada tahun 2015 dengan judul Evaluasi *Output* dan *Outcome* pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkesmaskot) di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui *output* dan *outcome* dari program Jamkesmaskot di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan hasil penelitiannya yaitu berkaitan dengan indikator *output*, cakupan

kepesertaan program Jamkesmaskot di Kota Semarang sudah mencapai 100%, mutu pelayanan kesehatan di Kota Semarang sudah meningkat perlahan-lahan secara bertahap, akses masyarakat juga sudah semakin mudah. Berkaitan dengan indikator *outcome*, menimbulkan dampak positif yaitu seluruh warga miskin dan/atau tidak mampu di Kota Semarang sudah mendapatkan jaminan pemeliharaan pelayanan kesehatan, ada rasa aman bagi warga miskin di Kota Semarang, serta warga yang rawan miskin atau hampir miskin tidak dibebani dengan biaya tinggi dan dampak negatif yaitu ada beberapa warga yang bermental miskin dan bergantung pada program dari Pemerintah, terjadi diskriminasi antara pasien umum dan pasien Jamkesmaskot oleh pihak rumah sakit, serta masih sering ditemui perbedaan persepsi antara DKK dan Rumah Sakit dalam menerjemahkan Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kota Semarang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riduansyah Syafaripada tahun 2015 dengan judul Evaluasi Program Kebersihan Lingkungan Pasar di Kota Banjarmasin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program kebersihan lingkungan pasar di Kota Banjarmasin, yang meliputi: 1) mengetahui *output* program antara harapan dan kenyataan; 2) mengetahui *outcome* program antara harapan dan kenyataan. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan hasil penelitiannya yaitu program kebersihan lingkungan pasar di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan sendiri oleh Dinas Kebersihan dan

Pertamanan belum berhasil, karena *output* dan *outcome* tidak sesuai harapan. Sebaliknya, program kebersihan lingkungan pasar yang melibatkan elemen *governance*, yaitu LSM Lingkungan, Pengelola Pasar, Pedagang pasar, dan DKP berhasil meningkatkan kebersihan lingkungan pasar Kalindo dan Kesatriaan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Olga Y. L. Lintjewas, Femmy Tulusandan Maxi Egeten pada tahun 2016 dengan judul Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan pemberian bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) di Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) di Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan dengan baik, semua proses yang dilakukan telah sesuai pedoman yang ditetapkan dan pelaksanaan program ini telah memberikan dampak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Jamila Harianipada tahun 2017 dengan judul Evaluasi Kinerja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (Studi Evaluasi *Policy Output* dan *Policy Outcome* Program *Expanding Maternal And Neonatal Survival* (EMAS) di Kabupaten Sidoarjo). Tujuan dari penelitian ini untuk menilai sejauh mana capaian atau kinerja dari program EMAS di Kabupaten Sidoarjo dan mencari penyebab hasil yang kurang maksimal dalam mencapai tujuan utama program EMAS. Metode yang digunakan

adalah Deskriptif Kualitatif dengan hasil penelitiannya yaitu kinerja program EMAS sudah berhasil dalam mencapai tujuan, program EMAS mampu berkontribusi terhadap penurunan AKI dan AKB yang diharapkan oleh program MDG's, dari segi *policy output* dan *policy outcome* tujuan yang ditetapkan telah tercapai meski ada satu aspek yang belum memenuhi kriteria yaitu aspek cakupan, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan antara lain: ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Junior Dengah, Novie Pioh dan Josef Kairupan pada tahun 2017 dengan judul Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat sejauh mana pemerintah berhasil mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima dan apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan hasil penelitiannya yaitu sumber daya pendukung (input) dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini sudah memadai tapi, dalam penerapannya (proses) di lapangan sikap dari para aparat Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan sering kali para aparat meminta restribusi pada para PKL agar bisa berjualan dipusat kota. Hasil (*output*) kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini membuat para pedagang kaki merasa

tidak diuntungkan oleh pemerintah kota dan masyarakat tidak merasakan dampak yang positif dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini.

Semua penelitian yang diuraikan diatas dilakukan pada kebijakan dan dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Beberapa penelitian tersebut mengkaji evaluasi *output* dan *outcome* menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan digunakan juga dalam penelitian ini. Semua penelitian terdahulu dapat dilihat dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Golda Oktavia, Hartuti Purnaweni, Aloysius Rengga Evaluasi Output dan Outcome pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkesmaskot) di Kota Semarang 2015	Mengetahui <i>output</i> dan <i>outcome</i> dari program Jamkesmaskot di Kota Semarang	Deskriptif Kualitatif	1) Berkaitan dengan indikator <i>output</i> , cakupan kepesertaan program Jamkesmaskot di Kota Semarang sudah mencapai 100%. Mutu pelayanan kesehatan di Kota Semarang sudah meningkat perlahan-lahan secara bertahap. Akses masyarakat juga sudah semakin mudah. 2) Berkaitan dengan indikator <i>outcome</i> , meliputi: a. Dampak positif : seluruh warga miskin dan/atau tidak mampu di Kota Semarang sudah mendapatkan jaminan pemeliharaan pelayanan kesehatan, ada rasa aman bagi warga miskin di Kota Semarang, serta warga yang rawan miskin atau hampir miskin tidak dibebani dengan biaya tinggi. b. Dampak negatif: ada beberapa warga yang bermental miskin dan bergantung pada program dari Pemerintah, terjadi diskriminasi antara pasien umum dan pasien Jamkesmaskot oleh pihak rumah sakit, serta masih sering ditemui perbedaan persepsi antara DKK dan Rumah Sakit dalam menerjemahkan	Perbedaan terletak pada analisis <i>output</i> dan <i>outcome</i> program

				Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kota Semarang	
2	Muhammad Riduansyah Syafari Evaluasi Program Kebersihan Lingkungan Pasar di Kota Banjarmasin 2015	Mengetahui efektivitas program kebersihan lingkungan pasar di Kota Banjarmasin, yang meliputi: 1) mengetahui <i>output</i> program antara harapan dan kenyataan. 2) mengetahui <i>outcome</i> program antara harapan dan kenyataan	Deskriptif kualitatif	Program kebersihan lingkungan pasar di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan sendiri oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum berhasil, karena <i>output</i> dan <i>outcome</i> tidak sesuai harapan. Sebaliknya, program kebersihan lingkungan pasar yang melibatkan elemen <i>governance</i> , yaitu LSM Lingkungan, Pengelola Pasar, Pedagang pasar, dan DKP berhasil meningkatkan kebersihan lingkungan pasar Kalindo dan Kesatriaan.	Perbedaan terletak pada analisis <i>output</i> dan <i>outcome</i> dimana penelitian ini menggunakan tujuan program sebagai dasar evaluasi dan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya program.
3	Olga Y. L. Lintjewas, Femmy Tulusan dan Maxi Egeten Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan	Mengevaluasi kebijakan pemberian bantuan pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) di Kabupaten Minahasa Selatan	Deskriptif Kualitatif	1) Pelaksanaan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) di Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan dengan baik. 2) Semua proses yang dilakukan telah sesuai pedoman yang ditetapkan. 3) Pelaksanaan program ini telah memberikan dampak dari pelaksanaan program ini	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini melakukan evaluasi secara keseluruhan dari <i>input</i> sampai <i>outcome</i> atas suatu program.

	2016				
4	Nurul Jamila Hariani Evaluasi Kinerja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (Studi Evaluasi Policy Output dan Policy Outcome Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) di Kabupaten Sidoarjo) 2017	Menilai sejauh mana capaian atau kinerja dari program EMAS di Kabupaten Sidoarjo dan mencari penyebab hasil yang kurang maksimal dalam mencapai tujuan utama program EMAS.	Deskriptif Kualitatif	<p>1) Kinerja program EMAS sudah berhasil dalam mencapai tujuan. Program EMAS mampu berkontribusi terhadap penurunan AKI dan AKB yang diharapkan oleh program MDG's. Dari segi <i>policy output</i> dan <i>policy outcome</i> tujuan yang ditetapkan telah tercapai meski ada satu aspek yang belum memenuhi kriteria yaitu aspek cakupan.</p> <p>2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan antara lain: ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.</p>	Perbedaan terletak pada analisis faktor yang mempengaruhi program.
5	Junior Dengah, Novie Pioh dan Josef Kairupan Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Manado 2017	Melihat sejauh mana pemerintah berhasil mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima dan apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan	Deskriptif Kualitatif	Sumber daya pendukung (<i>input</i>) dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini sudah memadai tapi, dalam penerapannya (proses) dilapangan sikap dari para aparat Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan sering kali para aparat meminta redistribusi pada para PKL agar bisa berjualan dipusat kota. Hasil (<i>output</i>) kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini membuat	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini melakukan evaluasi secara keseluruhan dari <i>input</i> sampai <i>outcome</i> atas suatu program.

				para pedagang kaki merasa tidak diuntungkan oleh pemerintah kota dan masyarakat tidak merasakan dampak yang positif dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini.	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Olahan Peneliti

1.6 Kajian Teori

1.6.1. Administrasi Publik

Prajudi Atmosudiro (Sugandi, 2011: 2) menerangkan bahwa administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Harbani Pasolong (Mulyadi, 2016: 33) administrasi publik merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Chandler dan Plano (Keban, 2014: 3), administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Berdasarkan tiga pendapat ahli tersebut, administrasi publik adalah proses yang terjadi diantara beberapa orang dalam mengorganisasikan berbagai sumber untuk mencapai tujuan kenegaraan berupa pemenuhan kebutuhan publik dengan membentuk kebijakan yang efektif dan efisien.

Ilmu administrasi publik memiliki sifat multidisipliner atau terbentuk atas beberapa ilmu lain yang mempengaruhinya. Dalam perkembangannya administrasi publik telah melalui enam paradigma administrasi publik seperti yang dikemukakan oleh G. Frederickson dalam Harbani Pasolong (2014:30), sebagai berikut:

1. Paradigma pertama; Birokrasi Klasik.

Fokus pengamatan paradigma ini adalah struktur organisasi dan fungsi prinsip-prinsip manajemen, sedangkan yang menjadi fokus adalah berbagai jenis organisasi baik pemerintahan maupun bisnis. Nilai pokok yang ingin diwujudkan adalah efisiensi, efektivitas, ekonomi dan rasionalitas.

2. Paradigma kedua; Birokrasi Neo-Klasik.

Paradigma kedua, Birokrasi Neo-Klasik. Nilai yang dianut dan ingin dicapai paradigma ini adalah serupa dengan paradigma pertama, tetapi lokus dan fokusnya berbeda. Lokusnya adalah "keputusan" yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya adalah "proses pengambilan keputusan" dengan perhatian khusus kepada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisa sistem dan penelitian operasi.

3. Paradigma ketiga; Kelembagaan.

Paradigma kelembagaan fokusnya perhatian paradigma ini terletak pada pemahaman mengenai "perilaku birokrasi" yang dipandang juga sebagai suatu organisasi yang kompleks. Masalah-masalah efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi kurang mendapat perhatian. Salah satu perilaku organisasi yang diungkapkan oleh paradigma ini adalah perilaku pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan inkremental, yang oleh Lindblom dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian birokrasi dengan preferensi kebijakan dan berbagai kemungkinan dari pejabat-pejabat politis.

4. Paradigma keempat; Hubungan Kemanusiaan.

Inti yang mendasari paradigma ini adalah keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, minimalisasi perbedaan dan status dan hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan optimasi tingkat kepuasan, fokus dari paradigma ini adalah "dimensi-dimensi kemanusiaan" dan aspek sosial dalam tiap jenis organisasi ataupun birokrasi.

5. Paradigma kelima; Pilihan Publik.

Fokus dari administrasi negara menurut paradigma ini tak lepas dari politik. Sedangkan fokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks.

6. Paradigma keenam; Administrasi Negara Baru.

Fokus dari administrasi Negara baru meliputi usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, ataupun membuat organisasi dapat berjatan ke arah dan dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. Karakteristik administrasi negara baru, menurut Frederickson, menolak bahwa para administrator dan teori administrasi bersifat netral atau bebas nilai dan nilai-nilai sebagaimana dianut dalam berbagai paradigma tersebut di atas adalah relevan sekalipun terkadang bertentangan satu sama lain. Misalnya kemudian, penyesuaian politik dan administrasi bagaimana yang harus dilakukan untuk mendorong tercapainya nilai-nilai tersebut.

1.6.2. Kebijakan Publik

Menurut Deddy Mulyadi (2016: 45) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku kebijakan terkait. Riant Nugroho (Sugandi, 2011: 74) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Selain itu, Anderson (Agustino, 2016: 17) menyatakan bahwa

kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan dari proses bersifat administratif dan politis yang dilalui para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, yang dilanjutkan oleh para aktor terkait untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Budi Winarno (2014: 36-37) menyatakan bahwa terdapat beberapa tahap dalam kebijakan sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pejabat publik menempatkan masalah-masalah yang ada di masyarakat ke dalam agenda kebijakan, setelah masalah-masalah tersebut melalui proses seleksi untuk menjadi prioritas masalah dalam agenda kebijakan. Selanjutnya, memasuki tahap perumusan kebijakan untuk memfokuskan pembahasan beberapa masalah dan masalah lainnya kemungkinan tidak disentuh atau ditunda untuk dibahas.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam tahap perumusan, akan dibahas oleh para pembuat kebijakan untuk didefinisikan dan dicari solusi dari masalah tersebut. Solusi untuk masalah yang dibahas dapat diperoleh dari berbagai alternatif kebijakan yang ada. Alternatif-alternatif kebijakan tersebut diusulkan oleh para aktor untuk saling bersaing agar dapat dipilih sebagai pemecah masalah yang paling tepat.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari banyaknya alternatif kebijakan yang diusulkan oleh para aktor akan dipilih salah satu alternatif kebijakan untuk diadopsi berdasarkan keputusan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Jika suatu kebijakan tidak diimplementasikan, maka hanya akan menjadi catatan para elite saja. Kebijakan harus dilaksanakan oleh seluruh badan administrasi maupun agen pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan finansial yang tersedia. Dalam tahap ini terdapat persaingan antara beberapa kepentingan dari pihak yang menentang atau mendukung kebijakan, yang akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut dalam penerapannya.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini dilakukan penilaian atas kebijakan yang telah dilaksanakan untuk melihat kemampuan kebijakan tersebut dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Lebih jauh lagi akan dilihat bagaimana dampak yang diinginkan dari kebijakan tersebut dapat terwujud, dan kemudian ditetapkan beberapa kriteria untuk mengukur kemampuan kebijakan dalam mewujudkan dampak yang diinginkan.

1.6.3. Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester & Stewart (Agustino, 2016: 163) evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat. Selanjutnya Anderson (Kusumanegara, 2010: 121) yang berpendapat bahwa evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan

taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Sedangkan Suharno (2013: 219), menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan dan dapat menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya. Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat dikatakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai tahapan dalam menganalisis kebijakan publik yang menilai kemampuan pelaksanaan suatu kebijakan dan dampak yang dihasilkannya dalam mencapai tujuan sesuai dengan standar yang diinginkan serta sebagai tahap awal bagi pembuatan kebijakan berikutnya.

Terdapat beberapa tipe evaluasi kebijakan, menurut Michael Borus (Kusumanegara, 2010: 124) terdapat tiga tipe evaluasi kebijakan atau program sebagai berikut:

- 1) Evaluasi program, atau disebut juga evaluasi formatif yaitu tipe evaluasi untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah program berjalan?
- 2) Evaluasi dampak atau disebut juga evaluasi sumatif adalah tipe evaluasi yang menjawab pertanyaan apa yang telah dilakukan suatu program? dan akibat apa yang muncul dari adanya suatu program?
- 3) Analisis strategis, tipe evaluasi yang berupaya menjawab pertanyaan seberapa jauh efektivitas program dalam mengatasi masalah sosial dibanding program-program lain terhadap masalah yang sama?

Model evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino (2016: 181-182) terdiri atas lima kriteria antara lain :

- 1) Sumber Daya Aparatur

Suatu kebijakan dapat dinilai berhasil atau tidak, diawali dengan pemahaman para aparat pemerintah terhadap suatu kebijakan. Apabila para aparat

pemerintah telah memahami tujuan kebijakan dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, maka kemungkinan keberhasilan kebijakan dapat tercapai.

2) Kelembagaan

Melihat pada sinergitas kelembagaan mengenai suatu kebijakan, baik koordinasi antar elit dalam satu lembaga maupun sinergitas antar-lembaga. Apabila para elit di masing-masing lembaga terkait, mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat tanpa adanya nilai individu didalamnya maka kebijakan dapat berjalan ke arah positif.

3) Sarana Prasarana dan Teknologi

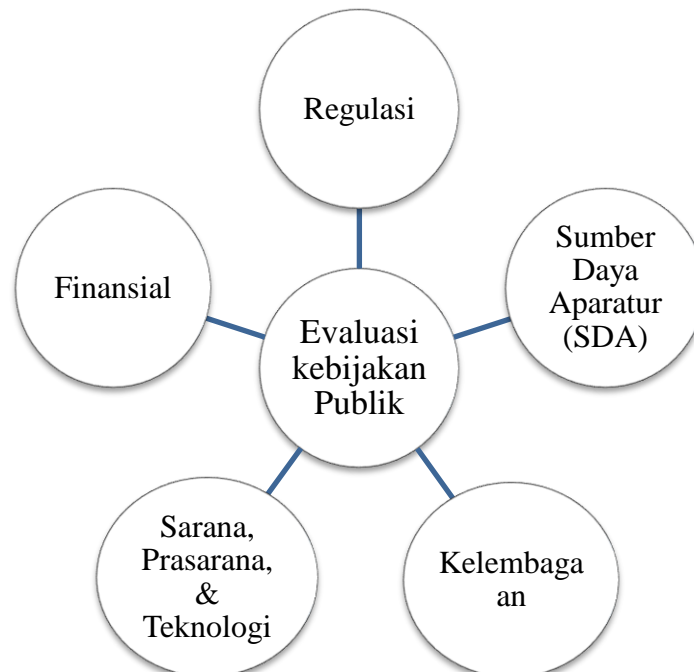
Kriteria ini menjadi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Tanpa adanya sarana, prasarana dan teknologi maka akan menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sebaliknya, apabila keberadaan sarana, prasarana dan teknologi telah memadai maka dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan.

4) Finansial

Dukungan keuangan baik dari pemerintah maupun swasta sangat dibutuhkan guna mendanai suatu kebijakan. Aliran dana yang terhambat bagi suatu kebijakan, juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

5) Regulasi

Dalam hal ini berupa aturan tambahan (pendukung) agar suatu kebijakan dapat dioperasionalkan dengan lebih aplikatif. Mendukung berbagai pihak untuk lebih memahami kebijakan dan memudahkan dalam pelaksanaannya.



Sumber: Leo Agustino, (2016: 180)

Gambar 1.3
Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut Leo Agustino

Selain kriteria-kriteria evaluasi kebijakan, menurut Bridgman & Davis (2000: 130) secara umum evaluasi kebijakan publik dapat diukur menggunakan empat indikator pokok yaitu : (1) indikator *input*, (2) indikator *process*, (3) indikator *outputs* dan (4) indikator *outcomes*. Keempat indikator pokok tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Indikator *input*. Indikator yang memusatkan perhatian pada sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan berupa sumber daya manusia, anggaran atau sarana prasarana lainnya.
- 2) Indikator *process*. Indikator yang menitikberatkan pada penilaian mengenai kemampuan sebuah kebijakan yang dapat diwujudkan menjadi pelayanan langsung kepada masyarakat meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan suatu kebijakan publik.
- 3) Indikator *outputs* (hasil). Indikator yang memberikan penilaian atas hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik tertentu

misalnya mengenai berapa jumlah orang yang berhasil mengikuti suatu program.

- 4) Indikator *outcomes* (dampak). Indikator yang mementingkan dampak yang diperoleh masyarakat luas atau kelompok tertentu atas adanya kebijakan publik tertentu, berupa dampak positif dan dampak negatif.

Menurut Ripley (Purwanto, 2015: 110) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas *output* dari suatu kebijakan, antara lain:

- 1) Akses

Digunakan untuk mengetahui bahwa program/layanan yang dilaksanakan dapat dengan mudah dijangkau oleh penerima program/layanan (kelompok sasaran). Selain itu, untuk melihat bagaimana pihak yang bertanggung jawab melaksanakan program/layanan menjalin komunikasi dengan kelompok sasaran. Terdapat kesamaan peluang bagi semua masyarakat untuk terlibat dan merasakan manfaat dari program/layanan yang diberikan, tanpa adanya diskriminasi.

- 2) Cakupan

Digunakan untuk menilai seberapa besar masyarakat (kelompok sasaran) yang menerima program/layanan.

- 3) Frekuensi

Digunakan untuk mengukur seberapa sering masyarakat (kelompok sasaran) memperoleh program/layanan. Pelaksanaan program/layanan dapat dikatakan baik apabila semakin tinggi frekuensi program/layanan diberikan pada kelompok sasaran sesuai dengan perencanaan program/layanan tersebut.

- 4) Bias

Digunakan untuk menilai apakah program/layanan yang diberikan oleh pelaksana menyimpang pada masyarakat yang tidak termasuk dalam kelompok sasaran atau tidak memiliki hak untuk menerima program/layanan tersebut atau sudah tepat sasaran.

5) *Service delivery* (ketepatan layanan)

Digunakan untuk menilai apakah program/layanan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau tidak.

6) Akuntabilitas

Digunakan untuk menilai apakah tindakan para pelaksana program/layanan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

7) Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Digunakan untuk mengukur apakah keluaran dari program/layanan yang diperoleh masyarakat (kelompok sasaran) sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Menurut C.Bennet dan K. Rockwell (2004) terdapat beberapa tahap dalam penilaian *outcomes policy*, antara lain :

1. *Initial Outcomes/Short Outcomes*

Outcomes policy dapat dinilai dari akibat langsung yang ditimbulkan dari suatu program/kebijakan dalam jangka waktu pendek yaitu 1-3 tahun. Tahap ini meliputi : *Knowledge* (Pengetahuan), *Attitudes* (sikap), *Skills* (Keterampilan), *Aspirations* (Aspirasi), dan lain sebagainya.

2. *Intermediate Outcomes*

Outcomes policy dapat dinilai dari akibat yang ditimbulkan dari suatu program/kebijakan dalam jangka menengah yaitu 4-5 tahun. Tahap ini meliputi : *Behavior* (Perilaku) dan *Practice* (Praktik).

3. *Long-term Outcomes*

Outcomes policy dapat dinilai dari akibat yang ditimbulkan dari suatu program/kebijakan dalam jangka panjang yaitu lebih 6-10 tahun. Tahap ini berupa *Condition* (Kondisi) seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan.

1.6.4. Evaluasi Program

Evaluasi itu sendiri menurut Ralph Winfred Tyler (Tayibnapsis, 2008: 3) merupakan proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan program dapat dicapai. Sedangkan menurut Malcolm M. Probus (Tayibnapsis, 2008) menyatakan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih. Definisi program dalam kaitannya dengan kebijakan publik menurut Wirawan (2016: 25) adalah aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Jadi, dapat dikatakan bahwa evaluasi program adalah proses yang dilakukan guna mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dari suatu program dan apakah ditemukan perbedaan antara apa yang ada dengan standar yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Ada begitu banyak model evaluasi yang dibuat oleh para ahli untuk mengevaluasi program dari berbagai bidang termasuk bidang kebijakan publik, dalam hal ini akan dibahas model evaluasi yang digunakan oleh peneliti yaitu:

Model Evaluasi Sistem Analisis

Model evaluasi sistem analisis (Wirawan, 2016: 153-158) atau sering disebut *Management Evaluation Model* adalah model evaluasi yang dikembangkan dari

Teori Umum Sistem (*General System Theory*) oleh Karl Luwig von Bertalanffy pada tahun 1951. Dalam manajemen, sistem memiliki bentuk linier proses yang terdiri dari masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), akibat (*outcome*) dan pengaruh (*impact*). Dari bentuk linier tersebut, masing-masing akan dilakukan evaluasi untuk memperoleh nilai atau manfaat sistem secara keseluruhan. Dalam model evaluasi sistem analisis ini dapat dilakukan evaluasi secara terpisah pada setiap jenis evaluasi. Terkait dengan hal itu, maka model evaluasi sistem analisis memiliki beberapa jenis evaluasi yaitu:

1) Evaluasi masukan (*input evaluation*)

Evaluasi yang bertujuan untuk menghimpun, menganalisis, dan menilai kecukupan kuantitas dan kualitas masukan yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

2) Evaluasi proses (*process evaluation*)

Evaluasi yang dilakukan pada tahap pelaksanaan program dan evaluasi yang melakukan pengumpulan informasi mengenai kemungkinan perbaikan program.

3) Evaluasi keluaran (*output evaluation*)

Evaluasi yang melakukan pengukuran dan penilaian terhadap keluaran program berupa produk yang dihasilkan dari adanya program.

4) Evaluasi akibat (*outcome evaluation*)

Evaluasi untuk mengukur terjadinya perubahan pada kelompok sasaran program.

5) Evaluasi pengaruh (*impact evaluation*)

Evaluasi yang menilai perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dan para pemangku kepentingan sebagai akibat dari intervensi program dalam jangka panjang.

Berdasarkan pada model evaluasi yang telah diuraikan, peneliti menggunakan model evaluasi Sistem Analisis karena model tersebut tidak bersifat linier dalam melakukan evaluasi. Peneliti memilih evaluasi *output* dan *outcomes* dari model evaluasi Sistem Analisis karena kedua jenis evaluasi tersebut tidak dapat dipisahkan serta jenis evaluasi tersebut dapat mengakomodasi kepentingan peneliti atas kaitannya dengan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang.

1.6.5. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Tujuan umum dari program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Sedangkan tujuan khusus dari program ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.
- b. Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
- c. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras.

Selanjutnya, sasaran dari program P2KP ialah:

- a. Meningkatkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
- b. Berkembangnya usaha pengolahan pangan skala UMKM sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
- c. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA serta menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan lokal.

Keberhasilan kegiatan P2KP akan tercermin dari indikator berikut:

- a. Meningkatnya jumlah partisipasi wanita dalam pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga yang B2SA;
- b. Meningkatnya jumlah usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, dan penyediaan pangan sumber karbohidrat dari bahan pangan lokal.
- c. Terciptanya Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) sesuai dengan karakteristik daerah.
- d. Meningkatnya motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam gerakan P2KP.

Pada pelaksanaannya, program ini terbagi dalam dua tahap yaitu tahap I (2009-2011) dan tahap II (2012-2015). Pelaksanaan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dilakukan melalui dua kegiatan berikut:

1. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan

Kegiatan internalisasi memiliki fokus untuk menanamkan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan.

2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

Kegiatan ini berupa upaya pengembangan usaha yang dimiliki masyarakat di bidang pangan dan pemberian fasilitas untuk mendukung usaha tersebut sebagai langkah lanjutan dari kegiatan internalisasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Kedua upaya tersebut yang kemudian dilanjutkan pada periode tahun 2016-2019 diwujudkan melalui kegiatan: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat. KRPL dilakukan dengan pendampingan oleh Penyuluh Pendamping KRPL desa dan Pendamping KRPL kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat pemerintah kabupaten/kota. Kelompok sasaran kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan adalah kelompok wanita yang beranggotakan minimal 15 rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu desa. Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok.

Mekanisme pengembangan KRPL dilakukan melalui beberapa tahapan berikut : (1) pembentukan kelompok, (2) pendamping, (3) identifikasi kebutuhan, (4) penyusunan rencana kegiatan, (5) pendampingan dan pelatihan, (6) pembuatan dan pengelolaan kebun bibit, (6) pengembangan demplot dan (7) penataan pekarangan KRPL. Kelompok wanita pelaksana KRPL tahun 2017 diberikan dana bantuan pemerintah sebesar Rp15.000.000; Rp 7.000.000 untuk pengembangan pekarangan anggota, Rp2.000.000 untuk pengembangan demplot kelompok, dan Rp 6.000.000 untuk kebun bibit dan pengairan sederhana.

Tabel 1.5 Lokasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Nama Ketua	Nama Penyuluh
1	Pakis	Gumelem	KWT Pakarti Utomo	Siswanti	Bapak Dwi Rahma
2	Ngluwar	Bligo	KWT Wanita Karya	Nurul Nugraeni	Bapak Tarom
3	Salam	Gulon	KWT Sri Arum	Susmiyati	Bapak Purwanjono
4	Bandongan	Gandusari	KWT Permai Tani	Darojatul Aliyah	Bapak Luwih Agus
5	Kajoran	Wuwuharjo	KWT Tunas Mulya	Umu Sakinah, S.Sos	Bapak Edi Irianto

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng

2) Kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)

Pengembangan pangan pokok lokal dilaksanakan dalam rangka mengembalikan pola konsumsi masyarakat kepada budaya dan potensi setempat dengan mengembangkan komoditas pangan yang ada melalui penyediaan teknologi pengolahan yang lebih modern sesuai kebutuhan masyarakat. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) adalah kegiatan untuk menghasilkan model pengembangan produk pangan pokok selain beras dan terigu sesuai karakteristik daerah berbasis sumber daya lokal. Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan MP3L antara lain: 1) Persiapan; 2) Pelaksanaan dan 3) Pengendalian intern. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan berbagai instansi terkait.

Salah satu kegiatan serupa MP3L yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang adalah Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis, namun kedua kegiatan tersebut memiliki perbedaan tujuan yang diuraikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.6
Perbedaan Tujuan Kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dan Tujuan Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis

No	Tujuan Kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	Tujuan Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis
1	Mengembangkan beras/nasi yang berasal dari pangan lokal sumber karbohidrat selain beras yang dapat disandingkan dengan nasi yang berasal dari beras.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wanita tani dan masyarakat dalam mengolah bahan baku lokal.
2	Mengembalikan budaya masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan lokal selain beras.	Mempercepat diversifikasi produksi olahan dan konsumsi pangan berbahan baku lokal.
3	Perbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayuran dan buah.	Menumbuhkan kreativitas wanita tani dan masyarakat dalam menciptakan resep-resep makanan berbahan baku lokal.
4		Merintis bisnis pangan lokal.

Sumber : Olahan Peneliti

Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis diikuti oleh 350 peserta yang berasal dari anggota KWT/PKK di 21 kecamatan yang sudah mempunyai usaha olahan dan belum pernah mengikuti pelatihan sejenis. Dari 21 kecamatan tersebut Kecamatan Pakis mengirimkan perwakilan terbanyak yaitu 19 orang, disusul Kecamatan Borobudur dengan 18 orang sedangkan Kecamatan Candimulyo dan Kecamatan Bandongan menjadi kecamatan yang mengirim

paling sedikit perwakilan yaitu 15 orang. Selain itu, terdapat 9 kecamatan yang mengirimkan 17 orang perwakilan, salah satunya Kecamatan Mungkid.

3) Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebarluasan informasi, perubahan sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga untuk pola hidup yang sehat, aktif dan produktif. Pendanaan kegiatan ini berasal dari APBD yang dilakukan dalam bentuk:

- a. Gerakan atau Kampanye P2KP
- b. Lomba Cipta Menu B2SA
- c. Penayangan Iklan di Media Massa
- d. Pameran P2KP
- e. Sosialisasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) melalui penyuluhan, seminar, maupun pameran.
- f. Melakukan kampanye kreatif dan inovatif antara lain melalui gerakan P2KP seperti *One Day No Rice*, dan lain sebagainya.
- g. Melaksanakan/berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk perlombaan, festival kuliner, dan demo masak pangan lokal.
- h. Kunjungan kerja.
- i. Pelibatan pemimpin/tokoh formal dan informal sebagai bentuk advokasi terhadap gerakan P2KP.

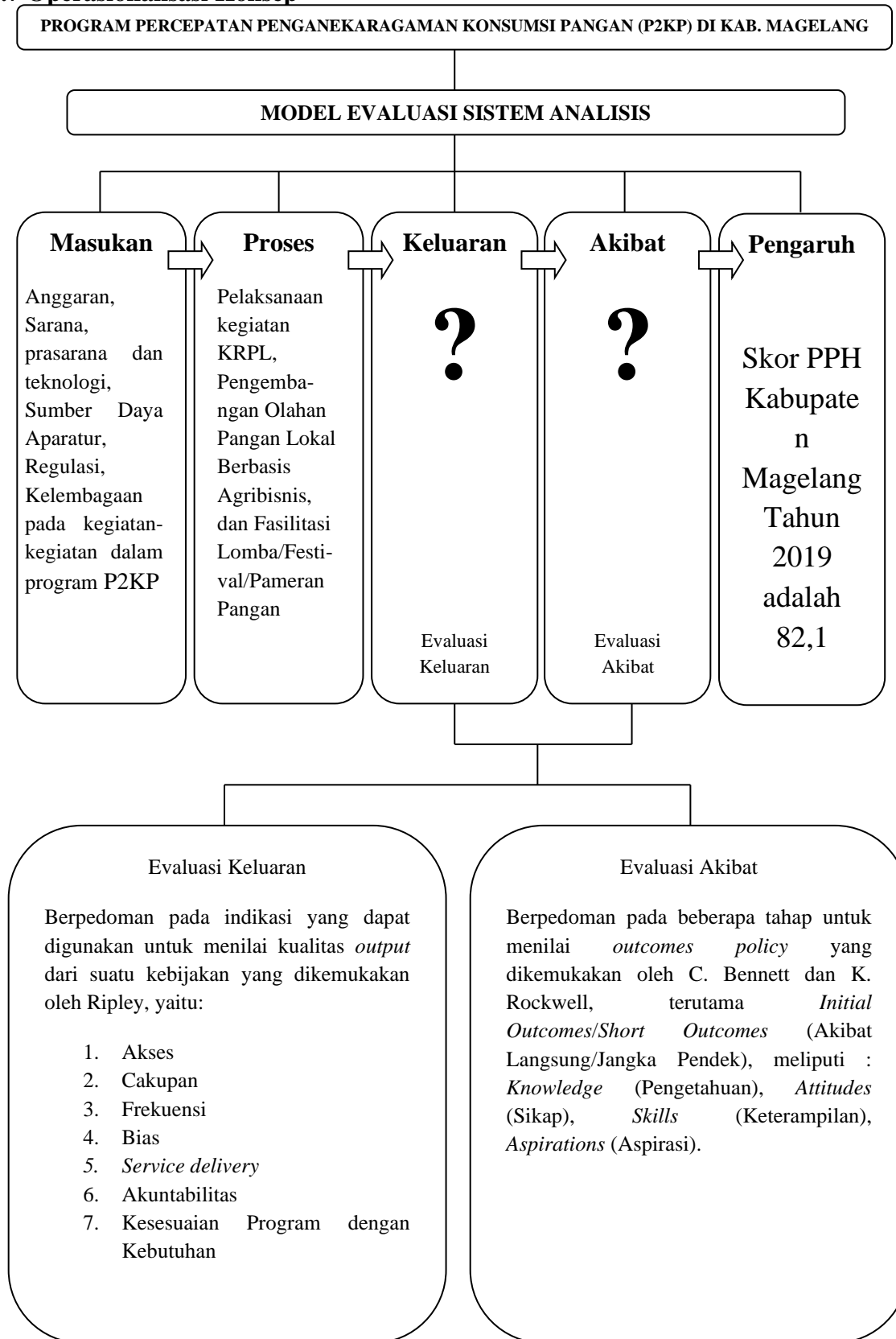
Kegiatan Fasilitasi Lomba/Festival/Pameran Pangan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang sebagai wujud dari Sosialisasi dan Promosi P2KP, memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA untuk meningkatkan kualitas menu pangan.
2. Mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam memilih, menentukan, menyusun menu B2SA berbasis sumberdaya lokal.
3. Membangun budaya keluarga mengonsumsi aneka menu makanan B2SA untuk memenuhi gizi sehari-hari dengan memanfaatkan potensi di sekitar rumah (pekarangan).
4. Menyebarkan informasi tentang hasil-hasil teknologi produk lokal non beras dan non terigu yang mempunyai nilai tambah.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penerapan prinsip B2SA.

Kegiatan Fasilitasi Lomba/Festival/Pameran Pangan berupa Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang diikuti oleh 20 peserta anggota KWT/PKK dari 21 kecamatan. Dalam lomba tersebut, juara I diraih oleh PKK Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran, juara II diraih oleh PKK Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan dan juara III diraih oleh PKK Desa Ketep Kecamatan Sawangan. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang juga melaksanakan beberapa kegiatan lainnya, yaitu:

- 1) sosialisasi pola konsumsi B2SA;
- 2) pameran produk pangan unggulan;
- 3) lomba Festival Kuliner Olahan Pangan Lokal;
- 4) lomba Kelompok Wanita Tani (KWT);
- 5) menyebar brosur tentang pemanfaatan pekarangan, menyusun menu B2SA dan skor PPH; dan
- 6) himbauan *one day no rice* untuk aparat pemerintah di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

1.7 Operasionalisasi Konsep



Gambar 1.4
Kerangka Pikir Konseptual

Tabel 1.7
Operasionalisasi Konsep

Komponen	Fenomena	Penjelasan
Keluaran (<i>Output</i>)	Keluaran dari pelaksanaan kegiatan KRPL, Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis, dan Fasilitasi Lomba/Festival/Pameran Pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang pada tahun 2017	Menganalisis beberapa indikasi, seperti : 1) Akses, menganalisis tingkat kemudahan masyarakat untuk menjangkau kegiatan-kegiatan tersebut 2) Cakupan, menganalisis seberapa besar masyarakat yang dijangkau oleh kegiatan-kegiatan tersebut 3) Frekuensi, menganalisis seberapa sering masyarakat dijangkau oleh kegiatan-kegiatan tersebut 4) Bias, menganalisis kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana dari kegiatan-kegiatan tersebut 5) <i>Service delivery</i> , menganalisis ketepatan waktu pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut 6) Akuntabilitas, menganalisis tanggung jawab para pelaksana atas tugasnya terkait kegiatan-kegiatan tersebut 7) Kesesuaian Program dengan Kebutuhan, menganalisis kesesuaian antara kegiatan-kegiatan tersebut dengan kebutuhan kelompok sasaran
Akibat (<i>Outcomes</i>)	Akibat yang muncul dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program P2KP di Kabupaten Magelang pada tahun 2017	Menganalisis tahap <i>Initial Outcomes/Short Outcomes</i> (Akibat Langsung/Jangka Pendek), meliputi : 1) <i>Knowledge</i> (Pengetahuan), menganalisis pengetahuan yang diperoleh kelompok sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program P2KP tahun 2017 2) <i>Attitudes</i> (Sikap), menganalisis sikap kelompok sasaran sesudah pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program P2KP tahun 2017 3) <i>Skills</i> (Keterampilan), menganalisis keterampilan yang dimiliki kelompok sasaran setelah pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program P2KP tahun 2017 4) <i>Aspirations</i> (Aspirasi), menganalisis penyaluran aspirasi dari kelompok sasaran pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program P2KP tahun 2017
Kendala	Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program P2KP di Kabupaten Magelang pada tahun 2017	Menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KRPL, Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis, dan Fasilitasi Lomba/Festival/Pameran Pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang pada tahun 2017.

Sumber: Olahan Peneliti

1.8 Metoda Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Strauss dan Cobin mengatakan bahwa *Qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Basrowi, 2008:1). Menurut Bogdan dan Taylor (Basrowi, 2008:21) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu, Denzin dan Lincoln (Moleong 2016: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Berdasarkan ketiga definisi tersebut, penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian yang menghasilkan uraian deskriptif dimana data statistik atau angka hanya sebagai data pendukung mengenai fenomena yang terjadi dalam tatanan masyarakat dengan menggunakan metode yang tepat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma fenomenologi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena tertentu (Bungin, 2014: 68). Paradigma

fenomenologi dalam hal ini untuk menyatakan penampakan dari suatu kondisi sebagaimana adanya kondisi itu sendiri ataupun interaksi subjek dengan kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif mengenai evaluasi *output* dan *outcomes* program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang, karena sifat masalah yang diteliti begitu kompleks sehingga peneliti ingin memperoleh gambaran fenomena secara holistik dan dapat dijelaskan secara rinci untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1.8.2.Situs Penelitian

Lokus dari penelitian ini adalah Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, KWT Pakarti Utomo, KWT Wanita Karya, KWT Sri Arum, KWT Permai Tani, BPPK Kecamatan Mungkid, Borobudur, Candimulyo, Pakis, Kajoran, Ngluwar, Sawangan dan Muntilan.

1.8.3.Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan adalah orang yang berada di dalam latar penelitian. Informan memiliki fungsi sebagai pihak yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang keadaan latar penelitian itu sendiri. Selain itu, informan dapat memudahkan peneliti untuk menjangkau banyak informasi dalam waktu yang singkat. Peneliti perlu menguji informasi dan motivasi dari informan itu sendiri agar informasi yang diberikan dapat sesuai dengan fakta tanpa adanya motif lain dari informan tersebut (Basrowi, 2008: 86-87). Informan dalam penelitian ini diharapkan merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kabupaten Magelang Tahun 2017.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan prosedur purposif. Prosedur purposif adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang

menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2014: 107). Informan dalam penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa (Dengah, dkk, 2017: Vol. 2, No. 2). Pada teknik purposif ini, peneliti menentukan informan kunci yang menguasai informasi mengenai lingkungan penelitian secara langsung tanpa membutuhkan informan lain dalam memperoleh informasi dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Selain prosedur purposif, digunakan juga prosedur *snowball* yang memungkinkan adanya informan tambahan yang diperoleh dari rujukan informan yang sudah ada sebelumnya untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Prosedur *snowball* sebagai langkah lanjutan apabila informan yang sudah dipilih tidak mampu mendukung jalannya penelitian sampai diperoleh informasi secara tuntas, dimana informan yang sudah dipilih akan mendelegasikan perannya kepada informan lain. Dalam penelitian ini, setengah dari jumlah informan yang dipilih merupakan hasil prosedur *snowball* untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kabupaten Magelang Tahun 2017. Informan yang dipilih berasal dari empat kategori yaitu : Implementor, Kelompok Sasaran, Kelompok *Beneficiaries* dan, *Stakeholders* lain yang terlibat yaitu :

- a. Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang
- b. Ketua dan penyuluh KWT Pakarti Utomo
- c. Ketua dan penyuluh KWT Wanita Karya
- d. Ketua KWT Sri Arum
- e. Ketua KWT Permai Tani
- f. Koordinator BPPK Kecamatan Kajoran

- g. Koordinator BPPK Kecamatan Candimulyo
- h. Koordinator BPPK Kecamatan Muntilan
- i. Koordinator BPPK Kecamatan Sawangan
- j. Staf BPPK Kecamatan Borobudur
- k. Staf BPPK Kecamatan Mungkid
- l. Juara II Lomba Cipta Menu B2SA 2017 dari Kecamatan Muntilan
- m. Juara III Lomba Cipta Menu B2SA 2017 dari Kecamatan Sawangan
- n. Salah satu peserta Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis dari Kecamatan Candimulyo

1.8.4. Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (Basrowi, 2008:169-172) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, dan foto sebagai berikut:

a. Kata-kata dan tindakan

Data hasil dari apapun yang dinyatakan dan dilakukan oleh informan ataupun orang-orang dalam latar penelitian yang masuk dalam pengamatan peneliti dan tercatat dalam catatan lapangan.

b. Sumber tertulis

Data yang diperoleh dari beberapa referensi seperti buku, jurnal, arsip, dokumen pribadi dari informan, maupun dokumen resmi dari instansi tertentu.

c. Foto

Data berupa hasil dokumentasi oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung.

1.8.5.Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari informan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang
- 2) Ketua dan penyuluh KWT Pakarti Utomo
- 3) Ketua dan penyuluh KWT Wanita Karya
- 4) Ketua KWT Sri Arum
- 5) Ketua KWT Permai Tani
- 6) Koordinator BPPK Kecamatan Kajoran
- 7) Koordinator BPPK Kecamatan Candimulyo
- 8) Koordinator BPPK Kecamatan Muntilan
- 9) Koordinator BPPK Kecamatan Sawangan
- 10) Staf BPPK Kecamatan Borobudur
- 11) Staf BPPK Kecamatan Mungkid
- 12) Juara II Lomba Cipta Menu B2SA 2017 dari Kecamatan Muntilan
- 13) Juara III Lomba Cipta Menu B2SA 2017 dari Kecamatan Sawangan
- 14) Salah satu peserta Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis dari Kecamatan Candimulyo

b. Data Sekunder

1.8.6.Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi menurut Ngalim Purwanto (Basrowi, 2008:93-94) ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai

tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi pasif.

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi, 2008: 127). Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*).
3. Dokumentasi menurut Basrowi (2008: 158) merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Fungsi data sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam berupa segala sumber tertulis yang terkait dengan penelitian seperti laporan pemerintah dan jurnal untuk melihat kecenderungan dari data yang diperoleh.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Basrowi, 2008: 209-210) sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu tahap pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar yang diperoleh di lapangan. Adalah tahapan yang berlangsung selama penelitian, guna menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data yang ada sehingga dapat diinterpretasikan. Peneliti benar-benar fokus pada data yang valid dengan

mengecek ulang kepada informan lain apabila menyangsikan kebenaran data yang diperoleh.

b. Penyajian data

Merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun dan memberikan kemungkinan untuk dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan atau bagan guna memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan dari informasi tersebut serta dilakukan secara sistematis dimana informasi yang serupa akan dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang menunjukkan bagian-bagian sesuai dengan rumusan masalah yang ada untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Merupakan bagian akhir dari proses penelitian kualitatif yang utuh dan juga berlangsung selama penelitian. Validitas harus selalu dijamin dengan selalu menguji kebenaran dan kesesuaian data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melaporkan hasil penelitian lengkap sebagai hasil temuan yang berbeda dari temuan yang sudah ada.

Miles and Huberman juga mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

1.8.8. Kualitas Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2016: 330-332). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian

dengan cara membandingkan hasil data pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, data hasil perbandingan tersebut menjadi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.